

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah hukum yang tertulis dan merupakan konstitusi bagi pemerintah negara republik Indonesia saat ini. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dalam melaksanakan pembangunan mengandalkan dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya membayar pajak. Bangsa Indonesia agar bisa menjadi pemerintahan yang mandiri harus bisa semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negeri yakni dengan melalui pajak. Karena pajak memiliki potensi penerimaan terbesar dalam negeri dan juga merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain dengan tersedianya sarana-prasarana pelayanan umum. (Pohan, 2014).

Dalam periode selama tiga tahun, penerimaan Negara dari sektor pajak yang ada di Indonesia mengalami peningkatan. Penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Dan untuk saat ini anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) masih dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak.

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Penerimaan KPP Mataram Barat (Milyar Rupiah) 2016-2018

Tahun	Rencana	Realisasi	Selisih
2016	Rp. 51.500.400.000	Rp. 4.655.610.845	Rp. 46.844.789.155
2017	Rp. 123.282.482.222	Rp. 24.102.779.728	Rp. 99.179.702.494
2018	Rp. 3.198.784.269	Rp. 4.250.604.299	Rp. -1.051.820.031

Sumber : KPP Mataram barat 2019

Menurut data pada tabel 1 menunjukkan bahwa rencana pajak pada tahun 2016 memperoleh sebesar Rp. 51.500.400.000 ditahun 2017 meningkat menjadi Rp. 123.282.482.222 dan ditahun 2018 menjadi Rp. 3.198.784.269. Jadi dapat kita ketahui dari tahun 2016 ke tahun 2017 tingkat rencana penerimaan pajak terus meningkat, hal ini dikarenakan pajak yang dipungut dari masyarakat Mataram menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksa penagihannya. Semua itu tidak lepas dari peran pemerintah dan wajib pajak guna memenuhi kebutuhan dana dalam negeri.

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Masta, 2011). Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran wajib pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus membayar melalui Surat Pemberitahuan (SPT), *Self assessment system* ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama (Sukiman, 2011). Penerapan *self assessment system* memungkinkan potensi adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidak patuhan para wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pihak fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak. Karena wajib pajak jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemeriksa pajak, maka tidak mungkin pemeriksaan dilakukan kepada semua wajib pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan lebih diutamakan pada wajib pajak dengan resiko tinggi melakukan penggelapan pajak, (Priantara, 2009:24). Hasil pemeriksaan pajak adalah dikeluarkannya ketetapan tentang berapa kewajiban pajak yang seharusnya terutang dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai produk hukum. Untuk kondisi saat sekarang pemeriksaan pajak bukan hanya untuk menguji kepatuhan wajib pajak saja melainkan dituntut dari pusat untuk memiliki target penerimaan setiap tahunnya. Cara tersebut merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan pada wajib pajak bila ada Surat Pemberitahuan (SPT) menyatakan lebih bayar, menyampaikan yang menyatakan rugi, terdapat kesalahan hitung maupun tulis dalam menyampaikan SPT, terlambat atau tidak menyampaikan SPT menurut (Jeni Susyanti and Dahlan, 2015). Wajib pajak yang terdapat ketidak wajaran dalam SPTnya akan dihimbau untuk melakukan konseling, jika wajib pajak tidak merespon himbauan melalui

peringatan 1 maupun peringatan 2 maka SPT tersebut akan dianalisis kembali dan dilakukannya proses pemeriksaan, masih begitu banyak wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga pada tahun 2015, wajib pajak yang terdaftar dalam system administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 wajib pajak, yang terdiri dari 2.472.632 wajib pajak badan, 5.239.385 wajib pajak orang pribadi Non-Karyawan dan 22.332.086 wajib pajak karyawan.

Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data BPS, hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia bekerja mencapai 93,72 juta orang. Oleh karena itu agar pelaksanaan upaya penegakan hukum melalui tindakan pemeriksaan pajak secara efektif dan efisien, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Dengan demikian akan memperoleh tingkat efektifitas dalam pemeriksaan pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Mataram Barat, karena di daerah Mataram selama ini pelayanan pajak seharusnya dapat membuat wajib pajak semakin sadar akan hak dan kewajiban atas pajak. Namun sampai saat ini masih begitu banyak wajib pajak menyelewengkan kewajibannya atas pembayaran pajak. Terutama terkait dengan target pajak reklame yang tidak tercapai, hal ini disebabkan kondisi ekonomi warga Mataram yang belum pulih dari bencana gempa bumi sehingga proses penagihan kurang optimal (<https://papua.antaranews.com>). Dan terkait kelonggaran perpajakan yang

diberikan oleh direktorat jendral pajak kementerian keuangan bagi warga Mataram yang mendapatkan pengecualian pengenaan sanksi perpajakan dan perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan (<https://tirto.id.com>).

Dengan adanya hal tersebut target penerimaan pada tahun sebelumnya di KPP Mataram Barat sebesar 1,238 triliun rupiah telah mencapai 91,23 persen, walaupun belum bisa mencapai 100 persen dan penerimaan SPT di KPP Pratama Mataram Barat masih sangat rendah, baru mencaapai 20 persen dari target yang ditentukan sebanyak 21.000 SPT. Karena kondisi gempa yang telah terjadi di Lombok – Nusa Tenggara Barat, terkait uraian di atas, dengan begitu peneliti ingin mengetahui seberapa efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pada sektor pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan Kota Mataram maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat ?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat ?
3. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut ;

1. Untuk menguji efektivitas pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat.
2. Ingin menguji bagaimana efektivitas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat.
3. Ingin menguji apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun tambahan nilai pengetahuan mengenai pentingnya pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang tidak bisa dihindari, juga bagi Kantor Pelayanan Perpajakan Mataram bisa meningkatkan kinerja dalam melakukan pemeriksaan pajak.